

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sama sekali tidak bertindak sebagai entitas pasif dalam menghadapi derasnya arus pembiayaan infrastruktur dari kekuatan ekonomi global. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan kapasitas rasionalitas dan agensi negara yang sangat kuat dalam mengelola pengaruh dualisme pembangunan antara Tiongkok melalui Belt and Road Initiative dan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency. Keputusan pemerintah untuk merangkul kedua kekuatan besar tersebut secara bersamaan merupakan bentuk nyata dari eksekusi strategi lindung nilai institusional. Langkah kalkulatif ini diambil untuk menutupi kesenjangan pembiayaan infrastruktur nasional yang bernilai sangat masif, sekaligus memastikan agar Indonesia tidak terperangkap dalam dominasi tunggal atau ketergantungan struktural pada salah satu kekuatan penyedia modal asing.

Melalui evaluasi terhadap indikator kondisionalitas kerja sama pembangunan, skema pembiayaan resmi dari institusi Jepang terbukti secara konsisten memberikan efektivitas substantif yang jauh lebih unggul bagi Indonesia. Pendekatan pembangunan yang dibawa oleh Jepang memprioritaskan aspek keberlanjutan sosial melalui pelibatan publik yang terstruktur sejak fase perencanaan hingga fase operasional. Selain itu, keunggulan nyata Jepang juga terlihat pada komitmen mereka terhadap

penguatan kapasitas lokal melalui proses transfer teknologi dan pengetahuan yang sangat sistematis. Keterlibatan tenaga ahli domestik yang didorong melalui skema operasi gabungan pada berbagai proyek strategis memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mendapatkan bangunan fisik semata, melainkan juga warisan institusional dan kemandirian sumber daya manusia di masa depan.

Keunggulan pendekatan Jepang tersebut semakin diperkuat ketika diukur melalui indikator stabilitas ruang fiskal negara. Instrumen pembiayaan yang ditawarkan beroperasi murni dalam koridor bantuan pembangunan resmi yang dirancang untuk tidak mencekik perekonomian negara penerima. Penerapan tingkat suku bunga yang sangat rendah serta ketersediaan durasi pelunasan yang sangat panjang memberikan keamanan dan keleluasaan bagi anggaran pendapatan dan belanja negara. Stabilitas fiskal ini merupakan elemen krusial bagi Indonesia, karena negara dapat terus melanjutkan agenda pembangunan di sektor prioritas lainnya tanpa harus dihantui oleh tekanan kewajiban pembayaran utang luar negeri yang membengkak secara tiba-tiba.

Di sisi lain, instrumen pembiayaan dari Tiongkok beroperasi dengan logika yang sama sekali berbeda, yakni berfokus pada percepatan fisik dan skala eksekusi yang masif. Pendekatan pinjaman semi komersial ini memang terbukti sangat tangguh dalam mengakselerasi konektivitas kawasan dan mendorong hilirisasi industri secara instan. Akan tetapi, model implementasi penyelesaian proyek menyeluruh yang sering mereka gunakan memunculkan berbagai kelemahan substantif di lapangan. Orientasi pada

kecepatan acap kali mengorbankan standar perlindungan lingkungan yang inklusif, memicu friksi sosial akibat minimnya proses konsultasi masyarakat sejak awal, serta memperlambat kemandirian teknologi nasional karena posisi posisi strategis yang masih didominasi oleh pekerja asing asal negara pemberi dana. Beban utang komersial yang dibawa juga secara nyata memunculkan risiko kewajiban kontinjensi yang berpotensi mengancam kesehatan fiskal apabila terjadi pembengkakan biaya.

Meskipun instrumen pembangunan Tiongkok membawa risiko fiskal dan kerentanan sosial yang jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang, penerimaan atas inisiatif tersebut tetap dinilai sebagai sebuah keputusan yang sepenuhnya rasional bagi Indonesia. Kebutuhan negara untuk segera mengejar ketertinggalan infrastruktur fisik dan memacu pertumbuhan ekonomi pasca pandemi dirasa sangatlah mendesak. Birokrasi pengajuan bantuan dari pihak Jepang yang terkenal sangat panjang dan sering kali memakan waktu bertahun tahun dinilai tidak akan mampu memfasilitasi seluruh urgensi konektivitas nasional secara sendirian. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia secara sadar dan pragmatis bersedia mengambil risiko pembiayaan yang lebih mahal dan keras dari Tiongkok demi mendapatkan utilitas utama berupa kecepatan penyelesaian fasilitas infrastruktur fisik yang dampak ekonominya dapat langsung dirasakan oleh pasar.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak ditentukan oleh superioritas absolut dari salah satu model kerja sama donor, melainkan oleh kepiawaian pemerintah dalam mendistribusikan peran kepada kedua raksasa ekonomi Asia tersebut sesuai dengan kebutuhan

spesifik di lapangan. Strategi diversifikasi kemitraan ini merupakan wujud keseimbangan agensi yang sangat cermat. Indonesia secara cerdas menggunakan pendanaan Tiongkok sebagai mesin akselerasi pertumbuhan ekonomi instan pada proyek berskala masif, sembari mempertahankan kerja sama dengan Jepang sebagai jangkar kualitas struktural, penjaga stabilitas fiskal, dan perbaikan tata kelola transportasi publik jangka panjang. Pengelolaan dualisme pembangunan ini menjadi bukti nyata kesuksesan manuver diplomasi infrastruktur Indonesia dalam memaksimalkan kepentingan nasional di tengah ketatnya rivalitas geopolitik kawasan.

4.2 Saran

Sebagai langkah evaluatif yang konkret, pemerintah Indonesia perlu bertindak lebih tegas dalam merumuskan regulasi domestik yang mengatur kewajiban alih pengetahuan dan teknologi pada setiap kontrak kerja sama antar badan usaha asing. Terutama pada proyek proyek yang menggunakan skema rancang bangun menyeluruh, keberhasilan transfer teknologi ini tidak bisa lagi hanya diserahkan pada niat baik atau inisiatif sukarela dari pihak investor. Kedepannya, harus ada klausul wajib yang mengikat secara hukum, lengkap dengan peta jalan yang sangat terukur mengenai kapan dan bagaimana proses transisi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja lokal akan dilakukan secara bertahap dan pasti.

Pada aspek stabilitas keuangan negara, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dituntut untuk merancang dan menerapkan kerangka manajemen risiko yang jauh lebih ketat. Hal ini sangat krusial khususnya untuk proyek proyek infrastruktur

berskala masif yang didanai melalui skema komersial. Pemerintah harus lebih disiplin dalam menjaga transparansi pencatatan utang publik dan sangat berhati-hati agar tidak reaktif memberikan jaminan negara ketika terjadi pembengkakan biaya di lapangan. Langkah preventif ini mutlak diperlukan guna mencegah agar kegagalan komersial dari suatu entitas bisnis tidak tiba-tiba bertransformasi menjadi beban utang tersembunyi yang menggerogoti ruang fiskal nasional kita.

Selain itu, Indonesia harus lebih cerdas dalam mengoptimalkan posisi tawar geopolitik serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Keunggulan luar biasa berupa cadangan mineral kritis seperti nikel seharusnya dijadikan alat tawar yang tangguh untuk mendiktekan persyaratan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan strategis nasional. Praktik baik berupa standar perlindungan lingkungan dan inklusi sosial yang selama ini dijalankan dengan sangat disiplin oleh institusi Jepang sudah semestinya diadopsi menjadi standar operasional baku di tingkat nasional. Standar ketat ini wajib diberlakukan secara merata kepada seluruh pemodal asing yang masuk ke Indonesia, tanpa perlu membedakan dari mana asal negara donor tersebut.

Terakhir, untuk terus melengkapi diskursus mengenai efektivitas pembangunan infrastruktur di masa mendatang, ranah akademik perlu mulai bergeser pada pengukuran yang lebih presisi. Penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk berani melakukan perhitungan kuantitatif mengenai efek pengganda ekonomi, sehingga rasio antara modal asing yang dimasukkan dengan penyerapan tenaga kerja lokal riil dapat terlihat secara transparan. Di

samping itu, melakukan studi komparatif dengan negara negara berkembang lain di kawasan Asia Tenggara juga akan sangat bernilai untuk memperkaya wawasan kita mengenai bagaimana negara tetangga meracik strategi rasionalitas mereka dalam menyeimbangkan manuver investasi asing di kawasan regional.